

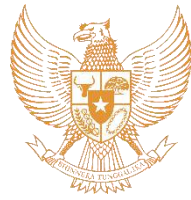


The coat of arms of Natuna Regency is a shield-shaped emblem. It features a central blue globe with a white star above it. The globe is flanked by green leaves and a yellow banner at the bottom. The banner contains the text 'LAUT SAKTI RANTAU BERTUAH'. The shield is surrounded by a yellow border.

RANCANGAN PERATURAN BUPATI NATUNA

2026





BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RANCANGAN PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 936);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 Rp1.048.202.600.000,00 (satu triliun empat puluh delapan miliar dua ratus dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah Rp1.043.202.600.000,00 (satu triliun empat puluh tiga miliar dua ratus dua juta enam ratus ribu rupiah);
- b. Belanja Daerah Rp1.048.202.600.000,00 (satu triliun empat puluh delapan miliar dua ratus dua juta enam ratus ribu rupiah);
- c. Pembiayaan Daerah:
 1. Penerimaan Pembiayaan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 2. Pengeluaran Pembiayaan Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 2

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah Rp123.395.557.000,00 (seratus dua puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
- b. Pendapatan Transfer Rp912.723.918.000,00 (sembilan ratus duabelas miliar tujuh ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus delapanbelas ribu rupiah); dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Rp7.083.125.000,00 (tujuh miliar delapan puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 3

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari:

- a. Pajak Daerah Rp85.132.064.000,00 (delapan puluh lima miliar seratus tiga puluh dua juta enam puluh empat ribu rupiah);
 - b. Retribusi Daerah Rp27.750.293.000,00 (dua puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Rp6.400.000.000,00 (enam miliar empat ratus juta rupiah); dan
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp4.113.200.000,00 (empat miliar seratus tigabelas juta dua ratus ribu rupiah).
- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer Pemerintah Pusat Rp872.682.608.000,00 (delapan ratus tujuh puluh dua miliar enam ratus delapan puluh dua juta enam ratus delapan ribu rupiah); dan
 - b. Transfer Antar Daerah Rp40.041.310.000,00 (empat puluh miliar empat puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Rp7.083.125.000,00 (tujuh miliar delapan puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 4

- (1) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:
- a. Pajak Reklame Rp129.500.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Pajak Air Tanah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Rp70.410.000.000,00 (tujuh puluh miliar empat ratus sepuluh juta rupiah);
 - d. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah);
 - e. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - f. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Rp9.702.200.000,00 (sembilan miliar tujuh ratus dua juta dua ratus ribu rupiah); dan
 - g. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp2.351.663.000,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
 - h. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp136.201.000,00 (seratus tiga puluh enam juta dua ratus satu ribu rupiah).

Pasal 5

- Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bersumber dari:
- a. Retribusi Jasa Umum Rp27.192.581.000,00 (dua puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
 - b. Retribusi Jasa Usaha Rp461.712.000,00 (empat ratus enam puluh satu juta tujuh ratus duabelas ribu rupiah); dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah).

Pasal 6

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bersumber dari:
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Rp6.400.000.000,00 (enam miliar empat ratus juta rupiah).
- (2) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d bersumber dari:

- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- b. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- c. Jasa Giro Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- d. Pendapatan Bunga Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- e. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah);
- f. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah);
- g. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- h. Pendapatan dari Pengembalian Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- i. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah); dan
- j. Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah Rp67.200.000,00 (enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 7

Transfer pemerintah pusat yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2 huruf a bersumber dari :

- a. Dana Desa Rp44.687.632.000,00 (empat puluh empat miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- b. Insentif Fiskal Rp13.921.767.000,00 (tigabelas miliar sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- c. Dana Bagi Hasil (DBH) Rp234.760.959.000,00 (dua ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus enam puluh juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- d. Dana Alokasi Umum (DAU) Rp495.880.177.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima miliar delapan ratus delapan puluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- e. DAK Fisik Rp2.283.860.000,00 (dua miliar dua ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah); dan
- f. DAK Non Fisik Rp81.148.213.000,00 (delapan puluh satu miliar seratus empat puluh delapan juta dua ratus tigabelas ribu rupiah).

Pasal 8

Transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 2 huruf b bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rp40.041.310.000,00 (empat puluh miliar empat puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Pasal 9

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 3 huruf bersumber dari Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Rp7.083.125.000,00 (tujuh miliar delapan puluh tiga juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Belanja Operasional Rp803.595.036.362,00 (delapan ratus tiga miliar lima ratus sembilan puluh lima juta tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah);

- b. Belanja Modal Rp121.893.183.638,00 (seratus dua puluh satu miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta seratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah);
- c. Belanja Tidak Terduga Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- d. Belanja Transfer Rp117.714.380.000,00 (seratus tujuh belas miliar tujuh ratus empat belas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 11

Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai Rp494.456.675.462,00 (empat ratus sembilan puluh empat miliar empat ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus enam puluh dua rupiah);
- b. Belanja Barang dan Jasa Rp288.399.187.228,00 (dua ratus delapan puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah);
- c. Belanja Subsidi Rp660.480.000,00 (enam ratus enam puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- d. Belanja Hibah Rp16.769.993.672,00 (enam belas miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah); dan
- e. Belanja Bantuan Sosial Rp3.305.700.000,00 (tiga miliar tiga ratus lima juta tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 12

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah Rp1.116.000.000,00 (satu miliar seratus enambelas juta rupiah);
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp13.598.421.340,00 (tiga belas miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah);
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp37.780.210.542,00 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan puluh juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus empat puluh dua rupiah);
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp69.116.471.683,00 (enam puluh sembilan miliar seratus enam belas juta empat ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah);
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp265.765.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- f. Belanja Modal Aset Lainnya Rp16.315.073,00 (enambelas juta tiga ratus limabelas ribu tujuh puluh tiga rupiah).

Pasal 13

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 14

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri atas:

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp299.698.834.038,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu tiga puluh delapan rupiah);
- b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN Rp184.573.069.841,00 (seratus delapan puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta enam puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah);

- c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Rp8.393.685.583,00 (delapan miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah);
- d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Rp1.078.886.000,00 (satu miliar tujuh puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Rp635.200.000,00 (Enam ratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah); dan
- f. Belanja Pegawai BLUD Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah).

Pasal 15

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri atas :

- a. Belanja Barang Rp50.934.310.015,00 (lima puluh miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu lima belas rupiah);
- b. Belanja Jasa Rp129.518.904.280,00 (seratus dua puluh sembilan miliar lima ratus delapan belas juta sembilan ratus empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah);
- c. Belanja Pemeliharaan Rp14.575.190.338,00 (empat belas miliar lima ratus tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);
- d. Belanja Perjalanan Dinas Rp48.204.516.408,00 (empat puluh delapan miliar dua ratus empat juta lima ratus enam belas ribu empat ratus delapan rupiah);
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Rp5.366.380.000,00 (lima miliar tiga ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- f. Belanja Barang dan Jasa BOSP Rp18.217.757.003,00 (Delapan belas miliar dua ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu tiga rupiah);
- g. Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp21.582.128.984,00 (dua puluh satu miliar lima ratus delapan puluh dua juta seratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).

Pasal 16

Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, terdiri atas :

- a. Belanja Subsidi kepada BUMN Rp60.480.000,00 (enam puluh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah); dan
- b. Belanja Subsidi kepada BUMD Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 17

Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, terdiri atas :

- a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp16.230.554.791,00 (enam belas miliar dua ratus tiga puluh juta lima ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah);
- b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp539.438.881,00 (lima ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah);

Pasal 18

Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, terdiri atas :

- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Rp703.200.000,00 (tujuh ratus tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga Rp2.398.500.000,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah); dan
- c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Rp204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah).

Pasal 19

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, yaitu Belanja Modal Tanah Rp1.116.000.000,00 (satu miliar seratus enambelas juta rupiah).

Pasal 20

Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Besar Rp170.467.000,00 (seratus tujuh puluh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- b. Belanja Modal Alat Angkutan Rp3.704.104.000,00 (tiga miliar tujuh ratus empat juta seratus empat ribu rupiah);
- c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Rp31.357.500,00 (tiga puluh satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- d. Belanja Modal Alat Pertanian Rp23.731.000,00 (dua puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp4.386.145.440,00 (empat miliar tiga ratus delapan puluh enam juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus empat puluh rupiah);
- f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp60.604.000,00 (enam puluh juta enam ratus empat ribu rupiah);
- g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp369.929.800,00 (tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);
- h. Belanja Modal Alat Laboratorium Rp158.346.000,00 (seratus lima puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- i. Belanja Modal Komputer Rp3.222.938.600,00 (tiga miliar dua ratus dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
- j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja Rp53.550.000,00 (lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- k. Belanja Modal Rambu-Rambu Rp17.248.000,00 (tujuh belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah); dan
- l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp1.400.000.000,00 (satu miliar empat ratus juta rupiah).

Pasal 21

Belanja modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, terdiri atas:

- a. Belanja Modal Bangunan Gedung Rp35.460.761.542,00 (tiga puluh lima miliar empat ratus enam puluh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu lima ratus empat puluh dua rupiah); dan
- b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp2.319.449.000,00 (dua miliar tiga ratus sembilan belas juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 22

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, terdiri atas:

- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp45.814.613.905,00 (empat puluh lima miliar delapan ratus empat belas juta enam ratus tiga belas ribu sembilan ratus lima rupiah);
- b. Belanja Modal Bangunan Air Rp13.063.557.055,00 (tiga belas miliar enam puluh tiga juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima puluh lima rupiah);
- c. Belanja Modal Instalasi Rp6.298.794.723,00 (enam miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah); dan
- d. Belanja Modal Jaringan Rp3.939.506.000,00 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus enam ribu rupiah).

Pasal 23

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, terdiri atas:

- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Rp49.868.000,00 (empat puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga Rp215.897.000,00 (dua ratus lima belas juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah); dan
- c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Rp16.315.073,00 (enambelas juta tiga ratus limabelas ribu tujuh puluh tiga rupiah).

Pasal 24

Belanja Tidak Terduga Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 25

Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, terdiri atas Belanja Bagi Hasil yang terdiri atas:

- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa Rp8.513.212.100,00 (delapan miliar lima ratus tigabelas juta dua ratus duabelas ribu seratus rupiah); dan
- b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa Rp225.610.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Pasal 26

Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Rp108.975.557.900,00 (seratus delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 27

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 28

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, yaitu sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 29

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah yang diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Sosial yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan yang diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bagi Hasil yang diterima serta SKPD Pemberi Bagi Hasil; Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
- g. Lampiran VII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD Dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.
- j. Lampiran X

Pasal 30

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya Dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal

BUPATI NATUNA,

CEN SUI LAN

Diundangkan di Ranai
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025 NOMOR



KABUPATEN NATUNA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	123.395.557.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	85.132.064.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	129.500.000,00
4.1.01.09.001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	100.000.000,00
4.1.01.09.001.00001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	100.000.000,00
4.1.01.09.002	Pajak Reklame Kain	25.000.000,00
4.1.01.09.002.00001	Pajak Reklame Kain	25.000.000,00
4.1.01.09.003	Pajak Reklame Melekat/Stiker	4.500.000,00
4.1.01.09.003.00001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	4.500.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	2.500.000,00
4.1.01.12.001	Pajak Air Tanah	2.500.000,00
4.1.01.12.001.00001	Pajak Air Tanah	2.500.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	70.410.000.000,00
4.1.01.14.023	Pajak Pasir dan Kerikil	50.000.000,00
4.1.01.14.023.00001	Pajak Pasir dan Kerikil	50.000.000,00
4.1.01.14.024	Pajak Pasir Kuarsa	70.000.000.000,00
4.1.01.14.024.00001	Pajak Pasir Kuarsa	70.000.000.000,00
4.1.01.14.030	Pajak Tanah Liat	30.000.000,00
4.1.01.14.030.00001	Pajak Tanah Liat	30.000.000,00
4.1.01.14.037	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	330.000.000,00
4.1.01.14.037.00001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	330.000.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.400.000.000,00
4.1.01.15.001	PBBP2	1.400.000.000,00
4.1.01.15.001.00001	PBBP2	1.400.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	1.000.000.000,00
4.1.01.16.001	BPHTB-Pemindahan Hak	800.000.000,00
4.1.01.16.001.00001	BPHTB-Pemindahan Hak	800.000.000,00
4.1.01.16.002	BPHTB-Pemberian Hak Baru	200.000.000,00
4.1.01.16.002.00001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	200.000.000,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	9.702.200.000,00
4.1.01.19.001	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	1.920.000.000,00
4.1.01.19.001.00001	PBJT-Restoran	1.920.000.000,00
4.1.01.19.002	PBJT-Tenaga Listrik	7.300.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.19.002.00001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	6.500.000.000,00
4.1.01.19.002.00002	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	800.000.000,00
4.1.01.19.003	PBJT-Jasa Perhotelan	440.000.000,00
4.1.01.19.003.00001	PBJT-Hotel	440.000.000,00
4.1.01.19.005	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	42.200.000,00
4.1.01.19.005.00002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	42.200.000,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	2.351.663.000,00
4.1.01.20.001	Opsen PKB	2.351.663.000,00
4.1.01.20.001.00001	Opsen PKB	2.351.663.000,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	136.201.000,00
4.1.01.21.001	Opsen BBNKB	136.201.000,00
4.1.01.21.001.00001	Opsen BBNKB	136.201.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	27.750.293.000,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	27.192.581.000,00
4.1.02.01.001	Retribusi Pelayanan Kesehatan	26.994.581.000,00
4.1.02.01.001.00001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	1.500.000.000,00
4.1.02.01.001.00005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	25.494.581.000,00
4.1.02.01.002	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	180.000.000,00
4.1.02.01.002.00001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	180.000.000,00
4.1.02.01.009	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	18.000.000,00
4.1.02.01.009.00001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	18.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	461.712.000,00
4.1.02.02.002	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	312.112.000,00
4.1.02.02.002.00002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	312.112.000,00
4.1.02.02.003	Retribusi Tempat Pelelangan	8.000.000,00
4.1.02.02.003.00001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	8.000.000,00
4.1.02.02.005	Retribusi Tempat Khusus Parkir	81.600.000,00
4.1.02.02.005.00001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	81.600.000,00
4.1.02.02.010	Retribusi Penyeberangan di Air	60.000.000,00
4.1.02.02.010.00001	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang	60.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	96.000.000,00
4.1.02.03.007	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	96.000.000,00
4.1.02.03.007.00001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	96.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.400.000.000,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	6.400.000.000,00
4.1.03.02.001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6.400.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.03.02.001.00001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	6.400.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.113.200.000,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	80.000.000,00
4.1.04.01.008	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	80.000.000,00
4.1.04.01.008.00001	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	80.000.000,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	80.000.000,00
4.1.04.03.001	Hasil Sewa BMD	80.000.000,00
4.1.04.03.001.00001	Hasil Sewa BMD	80.000.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	800.000.000,00
4.1.04.05.001	Jasa Giro pada Kas Daerah	800.000.000,00
4.1.04.05.001.00001	Jasa Giro pada Kas Daerah	800.000.000,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	800.000.000,00
4.1.04.07.001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	800.000.000,00
4.1.04.07.001.00001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	800.000.000,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	2.100.000.000,00
4.1.04.08.001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	500.000.000,00
4.1.04.08.001.00001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	500.000.000,00
4.1.04.08.002	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	1.600.000.000,00
4.1.04.08.002.00001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	1.600.000.000,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	50.000.000,00
4.1.04.11.001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	50.000.000,00
4.1.04.11.001.00001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	50.000.000,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	40.000.000,00
4.1.04.15.008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	40.000.000,00
4.1.04.15.008.00003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	40.000.000,00
4.1.04.19	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	96.000.000,00
4.1.04.19.001	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	96.000.000,00
4.1.04.19.001.00001	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	96.000.000,00
4.1.04.27	Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah	67.200.000,00
4.1.04.27.001	Pendapatan Denda Pajak Daerah	67.200.000,00
4.1.04.27.001.00119	Pendapatan Denda Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	60.000.000,00
4.1.04.27.001.00122	Pendapatan Denda PBBP2	800.000,00
4.1.04.27.001.00127	Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran	4.000.000,00
4.1.04.27.001.00131	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel	800.000,00
4.1.04.27.001.00155	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotik, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	1.600.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	912.723.918.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	872.682.608.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	44.687.632.000,00
4.2.01.05.001	Dana Desa	44.687.632.000,00
4.2.01.05.001.00001	Dana Desa	44.687.632.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	13.921.767.000,00
4.2.01.06.002	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	13.921.767.000,00
4.2.01.06.002.00001	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	13.921.767.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	234.760.959.000,00
4.2.01.07.001	DBH Pajak	123.958.027.000,00
4.2.01.07.001.00001	DBH PBB	116.288.132.000,00
4.2.01.07.001.00002	DBH PPh Pasal 21	7.291.826.000,00
4.2.01.07.001.00003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	358.295.000,00
4.2.01.07.001.00004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	19.774.000,00
4.2.01.07.002	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	110.802.932.000,00
4.2.01.07.002.00001	DBH SDA Minyak Bumi	68.953.269.000,00
4.2.01.07.002.00002	DBH SDA Gas Bumi	40.056.747.000,00
4.2.01.07.002.00005	DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	221.584.000,00
4.2.01.07.002.00006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	36.123.000,00
4.2.01.07.002.00009	DBH SDA Perikanan	1.535.209.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	495.880.177.000,00
4.2.01.08.001	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	476.351.958.000,00
4.2.01.08.001.00001	DAU	476.351.958.000,00
4.2.01.08.002	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	19.528.219.000,00
4.2.01.08.002.00001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1.400.000.000,00
4.2.01.08.002.00004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	8.480.705.000,00
4.2.01.08.002.00005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	9.647.514.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	83.432.073.000,00
4.2.01.09.001	DAK Fisik	2.283.860.000,00
4.2.01.09.001.00060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	2.283.860.000,00
4.2.01.09.002	DAK Non Fisik	81.148.213.000,00
4.2.01.09.002.00002	DAK Non Fisik-BOS Afirmasi	60.000.000,00
4.2.01.09.002.00004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	42.121.790.000,00
4.2.01.09.002.00005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	54.000.000,00
4.2.01.09.002.00006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	1.668.004.000,00
4.2.01.09.002.00007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	50.000.000,00
4.2.01.09.002.00009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	398.545.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.09.002.00011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7.624.840.000,00
4.2.01.09.002.00013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	3.241.296.000,00
4.2.01.09.002.00021	DAK Non Fisik-BOKKB-KB	1.190.592.000,00
4.2.01.09.002.00022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	507.000.000,00
4.2.01.09.002.00026	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	15.228.080.000,00
4.2.01.09.002.00027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	307.500.000,00
4.2.01.09.002.00028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	2.132.520.000,00
4.2.01.09.002.00029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	82.500.000,00
4.2.01.09.002.00030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	356.850.000,00
4.2.01.09.002.00034	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	179.338.000,00
4.2.01.09.002.00035	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	5.945.358.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	40.041.310.000,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	40.041.310.000,00
4.2.02.01.001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	40.041.310.000,00
4.2.02.01.001.00003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	27.063.804.000,00
4.2.02.01.001.00004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.447.450.000,00
4.2.02.01.001.00005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	11.530.056.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	7.083.125.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.083.125.000,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	7.083.125.000,00
4.3.03.02.001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	7.083.125.000,00
4.3.03.02.001.00001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	7.083.125.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.043.202.600.000,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	803.595.036.362,00
5.1.01	Belanja Pegawai	494.459.675.462,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	299.698.834.038,00
5.1.01.01.001	Belanja Gaji Pokok ASN	224.515.287.807,00
5.1.01.01.001.00001	Belanja Gaji Pokok PNS	161.163.629.807,00
5.1.01.01.001.00002	Belanja Gaji Pokok PPPK	63.351.658.000,00
5.1.01.01.002	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	19.448.857.000,00
5.1.01.01.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	14.115.565.000,00
5.1.01.01.002.00002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	5.333.292.000,00
5.1.01.01.003	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.042.030.000,00
5.1.01.01.003.00001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.042.030.000,00
5.1.01.01.004	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	9.877.777.000,00
5.1.01.01.004.00001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	9.877.777.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.005	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	6.194.608.000,00
5.1.01.01.005.00001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.180.960.000,00
5.1.01.01.005.00002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	4.013.648.000,00
5.1.01.01.006	Belanja Tunjangan Beras ASN	12.410.274.000,00
5.1.01.01.006.00001	Belanja Tunjangan Beras PNS	8.370.129.000,00
5.1.01.01.006.00002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.040.145.000,00
5.1.01.01.007	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.623.295.959,00
5.1.01.01.007.00001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	4.543.019.000,00
5.1.01.01.007.00002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	80.276.959,00
5.1.01.01.008	Belanja Pembulatan Gaji ASN	3.235.272,00
5.1.01.01.008.00001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.063.272,00
5.1.01.01.008.00002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.172.000,00
5.1.01.01.009	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	15.259.018.000,00
5.1.01.01.009.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	11.477.694.000,00
5.1.01.01.009.00002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	3.781.324.000,00
5.1.01.01.010	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	798.624.000,00
5.1.01.01.010.00001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	356.863.000,00
5.1.01.01.010.00002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	441.761.000,00
5.1.01.01.011	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.525.827.000,00
5.1.01.01.011.00001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.070.542.000,00
5.1.01.01.011.00002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	455.285.000,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	184.573.069.841,00
5.1.01.02.001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	41.237.626.841,00
5.1.01.02.001.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	35.598.178.841,00
5.1.01.02.001.00002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	5.639.448.000,00
5.1.01.02.002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	3.467.196.000,00
5.1.01.02.002.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	2.536.080.000,00
5.1.01.02.002.00002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK	931.116.000,00
5.1.01.02.003	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	4.436.712.000,00
5.1.01.02.003.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	3.515.940.000,00
5.1.01.02.003.00002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	920.772.000,00
5.1.01.02.004	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	5.619.768.000,00
5.1.01.02.004.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	5.619.768.000,00
5.1.01.02.005	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	77.634.720.000,00
5.1.01.02.005.00001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	65.672.556.000,00
5.1.01.02.005.00002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	11.962.164.000,00
5.1.01.02.006	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	52.177.047.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.02.006.00001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kendaraan Bermotor	325.170.000,00
5.1.01.02.006.00022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	7.804.203.000,00
5.1.01.02.006.00064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	42.121.790.000,00
5.1.01.02.006.00065	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	1.668.004.000,00
5.1.01.02.006.00066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	54.000.000,00
5.1.01.02.006.00068	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	13.960.000,00
5.1.01.02.006.00069	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	189.920.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	8.393.685.583,00
5.1.01.04.001	Belanja Uang Representasi DPRD	463.479.623,00
5.1.01.04.001.00001	Belanja Uang Representasi DPRD	463.479.623,00
5.1.01.04.002	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	63.000.000,00
5.1.01.04.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	63.000.000,00
5.1.01.04.003	Belanja Tunjangan Beras DPRD	77.000.000,00
5.1.01.04.003.00001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	77.000.000,00
5.1.01.04.004	Belanja Uang Paket DPRD	45.129.000,00
5.1.01.04.004.00001	Belanja Uang Paket DPRD	45.129.000,00
5.1.01.04.005	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	658.000.000,00
5.1.01.04.005.00001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	658.000.000,00
5.1.01.04.006	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	74.816.000,00
5.1.01.04.006.00001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	74.816.000,00
5.1.01.04.007	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	15.000.000,00
5.1.01.04.007.00001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	15.000.000,00
5.1.01.04.008	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.940.000.000,00
5.1.01.04.008.00001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	2.940.000.000,00
5.1.01.04.009	Belanja Tunjangan Reses DPRD	420.000.000,00
5.1.01.04.009.00001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	420.000.000,00
5.1.01.04.010	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	140.683.000,00
5.1.01.04.010.00001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	140.683.000,00
5.1.01.04.012	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	268.577.960,00
5.1.01.04.012.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	147.228.960,00
5.1.01.04.012.00002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.200.000,00
5.1.01.04.012.00003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	3.249.000,00
5.1.01.04.012.00004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	116.900.000,00
5.1.01.04.013	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.213.000.000,00
5.1.01.04.013.00001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.213.000.000,00
5.1.01.04.014	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	15.000.000,00
5.1.01.04.014.00001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	15.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.078.886.000,00
5.1.01.05.001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	56.784.000,00
5.1.01.05.001.00001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	56.784.000,00
5.1.01.05.002	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.290.000,00
5.1.01.05.002.00001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.290.000,00
5.1.01.05.003	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	102.212.000,00
5.1.01.05.003.00001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	102.212.000,00
5.1.01.05.004	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.273.000,00
5.1.01.05.004.00001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.273.000,00
5.1.01.05.005	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.167.000,00
5.1.01.05.005.00001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.167.000,00
5.1.01.05.006	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.000,00
5.1.01.05.006.00001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.000,00
5.1.01.05.007	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.612.000,00
5.1.01.05.007.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.612.000,00
5.1.01.05.008	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	137.000,00
5.1.01.05.008.00001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	137.000,00
5.1.01.05.009	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	409.000,00
5.1.01.05.009.00001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	409.000,00
5.1.01.05.010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	900.000.000,00
5.1.01.05.010.00006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	900.000.000,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	635.200.000,00
5.1.01.06.001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	235.200.000,00
5.1.01.06.001.00001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	235.200.000,00
5.1.01.06.002	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00
5.1.01.06.002.00001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	80.000.000,00
5.1.01.99.099	Belanja Pegawai BLUD	80.000.000,00
5.1.01.99.099.09999	Belanja Pegawai BLUD	80.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	288.399.187.228,00
5.1.02.01	Belanja Barang	50.934.310.215,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	50.756.490.215,00
5.1.02.01.001.00001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	863.715.000,00
5.1.02.01.001.00002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	408.343.000,00
5.1.02.01.001.00004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	5.694.115.740,00
5.1.02.01.001.00005	Belanja Bahan-Bahan Baku	3.350.000,00
5.1.02.01.001.00010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	45.200.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.001.00012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	1.309.200.400,00
5.1.02.01.001.00013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.121.350.100,00
5.1.02.01.001.00016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	7.000.000,00
5.1.02.01.001.00018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	127.214.371,00
5.1.02.01.001.00023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	20.215.536,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.650.330.251,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.200.887.300,00
5.1.02.01.001.00026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.515.980.662,00
5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	521.733.700,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	467.228.900,00
5.1.02.01.001.00030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	575.041.980,00
5.1.02.01.001.00031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	556.689.900,00
5.1.02.01.001.00032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	1.302.152.600,00
5.1.02.01.001.00034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	27.288.000,00
5.1.02.01.001.00035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	137.652.420,00
5.1.02.01.001.00036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	137.550.000,00
5.1.02.01.001.00037	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.373.237.100,00
5.1.02.01.001.00038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	6.193.042.354,00
5.1.02.01.001.00039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.321.775.249,00
5.1.02.01.001.00041	Belanja Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga-Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	130.000.000,00
5.1.02.01.001.00043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.181.432.600,00
5.1.02.01.001.00044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	57.134.000,00
5.1.02.01.001.00045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	4.400.000,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.824.879.000,00
5.1.02.01.001.00053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6.133.610.000,00
5.1.02.01.001.00055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	105.919.000,00
5.1.02.01.001.00056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.185.602.000,00
5.1.02.01.001.00058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.384.458.000,00
5.1.02.01.001.00059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	22.531.872,00
5.1.02.01.001.00061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	58.440.800,00
5.1.02.01.001.00063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	85.650.000,00
5.1.02.01.001.00064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	330.689.160,00
5.1.02.01.001.00065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	57.000.000,00
5.1.02.01.001.00066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	16.000.000,00
5.1.02.01.001.00070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	45.356.000,00
5.1.02.01.001.00074	Belanja Pakaian Adat Daerah	181.220.000,00
5.1.02.01.001.00075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.564.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.001.00076	Belanja Pakaian Olahraga	104.929.840,00
5.1.02.01.001.00077	Belanja Pakaian Paskibraka	265.379.380,00
5.1.02.01.004	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	177.820.000,00
5.1.02.01.004.00036	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2.500.000,00
5.1.02.01.004.00117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	85.000.000,00
5.1.02.01.004.00122	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	40.320.000,00
5.1.02.01.004.00648	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	50.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	129.518.904.280,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	94.368.039.810,00
5.1.02.02.001.00001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	392.420.000,00
5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.403.350.000,00
5.1.02.02.001.00004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.263.960.000,00
5.1.02.02.001.00005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	10.800.000,00
5.1.02.02.001.00006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.370.900.000,00
5.1.02.02.001.00007	Honorarium Rohaniwan	12.800.000,00
5.1.02.02.001.00008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	3.850.000,00
5.1.02.02.001.00011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	14.550.000,00
5.1.02.02.001.00012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	674.400.000,00
5.1.02.02.001.00013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	20.400.000,00
5.1.02.02.001.00014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	7.037.390.398,00
5.1.02.02.001.00023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	0,00
5.1.02.02.001.00025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	389.500.000,00
5.1.02.02.001.00026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	96.750.000,00
5.1.02.02.001.00028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	388.800.000,00
5.1.02.02.001.00029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	985.200.000,00
5.1.02.02.001.00030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	4.070.057.770,00
5.1.02.02.001.00031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	1.010.901.562,00
5.1.02.02.001.00033	Belanja Jasa Tenaga Supir	241.874.686,00
5.1.02.02.001.00035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	30.000.000,00
5.1.02.02.001.00037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	62.500.000,00
5.1.02.02.001.00039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	328.400.000,00
5.1.02.02.001.00041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	41.800.000,00
5.1.02.02.001.00042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	48.320.000,00
5.1.02.02.001.00046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	245.000.000,00
5.1.02.02.001.00047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	703.146.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.001.00049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	29.275.000,00
5.1.02.02.001.00050	Belanja Jasa Kalibrasi	141.062.800,00
5.1.02.02.001.00055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.574.940.000,00
5.1.02.02.001.00057	Belanja Jasa Operator Kapal	190.800.000,00
5.1.02.02.001.00059	Belanja Tagihan Telepon	412.745.950,00
5.1.02.02.001.00060	Belanja Tagihan Air	1.064.092.424,00
5.1.02.02.001.00061	Belanja Tagihan Listrik	8.307.613.716,00
5.1.02.02.001.00063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.702.752.560,00
5.1.02.02.001.00064	Belanja Paket/Pengiriman	472.960.000,00
5.1.02.02.001.00065	Belanja Penambahan Daya	45.000.000,00
5.1.02.02.001.00066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	20.000.000,00
5.1.02.02.001.00067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	887.155.000,00
5.1.02.02.001.00077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	436.987.072,00
5.1.02.02.001.00078	Belanja Sewa Jasa Internet	2.082.000.000,00
5.1.02.02.001.00080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	9.825.928.456,00
5.1.02.02.001.00081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	34.680.000,00
5.1.02.02.001.00082	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	147.000.000,00
5.1.02.02.001.00084	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga kependidikan	1.828.200.000,00
5.1.02.02.001.00085	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan tenaga kesehatan	2.404.604.364,00
5.1.02.02.001.00087	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional	2.751.960.000,00
5.1.02.02.001.00088	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan operator layanan operasional	27.591.512.052,00
5.1.02.02.001.00089	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan pengelola layanan operasional	981.360.000,00
5.1.02.02.001.00090	Belanja jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan penata layanan operasional	8.588.340.000,00
5.1.02.02.002	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	20.849.539.712,00
5.1.02.02.002.00001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.300.040.000,00
5.1.02.02.002.00003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	13.050.240.000,00
5.1.02.02.002.00004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	1.071.470.400,00
5.1.02.02.002.00005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.397.841.312,00
5.1.02.02.002.00006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	607.518.000,00
5.1.02.02.002.00007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	230.118.000,00
5.1.02.02.002.00009	Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BPJS	77.400.000,00
5.1.02.02.002.00012	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	92.880.000,00
5.1.02.02.002.00013	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	22.032.000,00
5.1.02.02.004	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.562.834.280,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.004.00034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	15.750.000,00
5.1.02.02.004.00036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	19.200.000,00
5.1.02.02.004.00037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	31.600.000,00
5.1.02.02.004.00043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	160.351.000,00
5.1.02.02.004.00048	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	65.000.000,00
5.1.02.02.004.00049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	1.485.880.000,00
5.1.02.02.004.00115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	82.953.280,00
5.1.02.02.004.00117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	542.500.000,00
5.1.02.02.004.00118	Belanja Sewa Mebel	45.000.000,00
5.1.02.02.004.00123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	12.000.000,00
5.1.02.02.004.00132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	26.000.000,00
5.1.02.02.004.00355	Belanja Sewa Peralatan Umum	76.600.000,00
5.1.02.02.005	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.522.610.000,00
5.1.02.02.005.00001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	552.540.000,00
5.1.02.02.005.00002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	236.000.000,00
5.1.02.02.005.00009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	44.590.000,00
5.1.02.02.005.00014	Belanja Sewa Bangunan Gedung Garasi/Pool	6.576.000,00
5.1.02.02.005.00043	Belanja Sewa Hotel	355.104.000,00
5.1.02.02.005.00049	Belanja Sewa Rumah Tidak Bersusun	200.000.000,00
5.1.02.02.005.00050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	1.127.800.000,00
5.1.02.02.007	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	15.000.000,00
5.1.02.02.007.00028	Belanja Sewa Alat Musik	15.000.000,00
5.1.02.02.008	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.725.800.000,00
5.1.02.02.008.00003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	70.000.000,00
5.1.02.02.008.00005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	762.000.000,00
5.1.02.02.008.00008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	250.000.000,00
5.1.02.02.008.00013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	500.000.000,00
5.1.02.02.008.00015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	250.000.000,00
5.1.02.02.008.00032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	893.800.000,00
5.1.02.02.009	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	306.166.410,00
5.1.02.02.009.00011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	50.000.000,00
5.1.02.02.009.00012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	154.916.410,00
5.1.02.02.009.00013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	101.250.000,00
5.1.02.02.010	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	350.000.000,00
5.1.02.02.010.00007	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Persampahan	350.000.000,00
5.1.02.02.012	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.246.740.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.012.00001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	1.681.820.000,00
5.1.02.02.012.00002	Belanja Sosialisasi	403.000.000,00
5.1.02.02.012.00003	Belanja Bimbingan Teknis	74.000.000,00
5.1.02.02.012.00004	Belanja Diklat Kepemimpinan	87.920.000,00
5.1.02.02.014	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	31.500.000,00
5.1.02.02.014.00001	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	1.500.000,00
5.1.02.02.014.00018	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	30.000.000,00
5.1.02.02.018	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah	30.000.000,00
5.1.02.02.018.00007	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	30.000.000,00
5.1.02.02.019	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	3.510.674.068,00
5.1.02.02.019.00001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	3.510.674.068,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	14.575.190.338,00
5.1.02.03.001	Belanja Pemeliharaan Tanah	210.000.000,00
5.1.02.03.001.00001	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	50.000.000,00
5.1.02.03.001.00029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	60.000.000,00
5.1.02.03.001.00035	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Lapangan Lainnya	100.000.000,00
5.1.02.03.002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.875.050.337,00
5.1.02.03.002.00034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	30.000.000,00
5.1.02.03.002.00035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	459.058.680,00
5.1.02.03.002.00036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1.187.991.028,00
5.1.02.03.002.00038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2.000.000,00
5.1.02.03.002.00049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	727.000.000,00
5.1.02.03.002.00114	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	100.000.000,00
5.1.02.03.002.00116	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	7.000.000,00
5.1.02.03.002.00117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	852.950.000,00
5.1.02.03.002.00118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	50.000.000,00
5.1.02.03.002.00121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	621.595.000,00
5.1.02.03.002.00123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.500.000,00
5.1.02.03.002.00132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	35.000.000,00
5.1.02.03.002.00133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	215.146.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.002.00204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	700.000.000,00
5.1.02.03.002.00232	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	30.000.000,00
5.1.02.03.002.00248	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	2.500.000,00
5.1.02.03.002.00405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	218.380.000,00
5.1.02.03.002.00406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	7.010.000,00
5.1.02.03.002.00409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	47.000.000,00
5.1.02.03.002.00410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	99.919.629,00
5.1.02.03.002.00494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	480.000.000,00
5.1.02.03.003	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.534.188.250,00
5.1.02.03.003.00001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.373.453.500,00
5.1.02.03.003.00006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	2.897.234.750,00
5.1.02.03.003.00016	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	55.000.000,00
5.1.02.03.003.00055	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Penerangan Pantai	208.500.000,00
5.1.02.03.004	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.944.451.751,00
5.1.02.03.004.00003	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	1.098.778.529,00
5.1.02.03.004.00013	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	191.061.022,00
5.1.02.03.004.00123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	20.000.000,00
5.1.02.03.004.00126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	634.612.200,00
5.1.02.03.005	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	11.500.000,00
5.1.02.03.005.00001	Belanja Pemeliharaan Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	11.500.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	48.204.516.408,00
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	48.128.916.408,00
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	29.856.846.608,00
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	17.793.473.800,00
5.1.02.04.001.00004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	478.596.000,00
5.1.02.04.002	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	75.600.000,00
5.1.02.04.002.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	75.600.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.366.380.000,00
5.1.02.05.001	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.057.280.000,00
5.1.02.05.001.00001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	365.080.000,00
5.1.02.05.001.00002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	15.000.000,00
5.1.02.05.001.00003	Belanja Beasiswa	198.000.000,00
5.1.02.05.001.00008	Belanja Uang yang Diberikan kepada RT atau dengan Sebutan Lain	1.696.800.000,00
5.1.02.05.001.00009	Belanja Uang yang Diberikan kepada RW atau dengan Sebutan Lain	782.400.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.05.002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.309.100.000,00
5.1.02.05.002.00001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	141.600.000,00
5.1.02.05.002.00002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	2.167.500.000,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	18.217.757.003,00
5.1.02.89.001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	15.645.887.003,00
5.1.02.89.001.00001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	15.228.387.003,00
5.1.02.89.001.00002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	417.500.000,00
5.1.02.89.002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	2.215.020.000,00
5.1.02.89.002.00001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	2.132.520.000,00
5.1.02.89.002.00002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja	82.500.000,00
5.1.02.89.003	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	356.850.000,00
5.1.02.89.003.00001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	356.850.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	21.582.128.984,00
5.1.02.99.099	Belanja Barang dan Jasa BLUD	21.582.128.984,00
5.1.02.99.099.09999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	21.582.128.984,00
5.1.04	Belanja Subsidi	660.480.000,00
5.1.04.01	Belanja Subsidi kepada BUMN	60.480.000,00
5.1.04.01.001	Belanja Subsidi kepada BUMN	60.480.000,00
5.1.04.01.001.00001	Belanja Subsidi kepada BUMN	60.480.000,00
5.1.04.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	600.000.000,00
5.1.04.02.002	Belanja Subsidi kepada BUMD	600.000.000,00
5.1.04.02.002.00001	Belanja Subsidi kepada BUMD	600.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	16.769.993.672,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	16.230.554.791,00
5.1.05.05.001	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.184.608.819,00
5.1.05.05.001.00002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	4.184.608.819,00
5.1.05.05.002	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	11.569.955.972,00
5.1.05.05.002.00001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	680.000.000,00
5.1.05.05.002.00002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	10.889.955.972,00
5.1.05.05.003	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	475.990.000,00
5.1.05.05.003.00002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	475.990.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	539.438.881,00
5.1.05.07.001	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	539.438.881,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.05.07.001.00001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	539.438.881,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.305.700.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	703.200.000,00
5.1.06.01.001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	703.200.000,00
5.1.06.01.001.00001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	703.200.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	2.398.500.000,00
5.1.06.02.001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	2.398.500.000,00
5.1.06.02.001.00001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	2.398.500.000,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	204.000.000,00
5.1.06.03.002	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	204.000.000,00
5.1.06.03.002.00001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	204.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	121.893.183.638,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.116.000.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	1.116.000.000,00
5.2.01.01.002	Belanja Modal Tanah Non Persil	16.000.000,00
5.2.01.01.002.00009	Belanja Modal Tanah Non Persil Lainnya	16.000.000,00
5.2.01.01.003	Belanja Modal Lapangan	1.100.000.000,00
5.2.01.01.003.00001	Belanja Modal Tanah Lapangan Olahraga	500.000.000,00
5.2.01.01.003.00012	Belanja Modal Tanah untuk Makam	600.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	13.598.421.340,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	170.467.000,00
5.2.02.01.001	Belanja Modal Alat Besar Darat	57.000.000,00
5.2.02.01.001.00011	Belanja Modal Mesin Proses	57.000.000,00
5.2.02.01.003	Belanja Modal Alat Bantu	113.467.000,00
5.2.02.01.003.00005	Belanja Modal Pompa	7.467.000,00
5.2.02.01.003.00012	Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	81.000.000,00
5.2.02.01.003.00016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	25.000.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	3.704.104.000,00
5.2.02.02.001	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.541.861.000,00
5.2.02.02.001.00001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0,00
5.2.02.02.001.00002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	500.000.000,00
5.2.02.02.001.00004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	501.861.000,00
5.2.02.02.001.00006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	2.540.000.000,00
5.2.02.02.003	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	162.243.000,00
5.2.02.02.003.00002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	162.243.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	31.357.500,00
5.2.02.03.003	Belanja Modal Alat Ukur	31.357.500,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.03.003.00009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	31.357.500,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	23.731.000,00
5.2.02.04.001	Belanja Modal Alat Pengolahan	23.731.000,00
5.2.02.04.001.00007	Belanja Modal Alat Pasca Panen	23.731.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.386.145.440,00
5.2.02.05.001	Belanja Modal Alat Kantor	291.432.000,00
5.2.02.05.001.00002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	578.000,00
5.2.02.05.001.00003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	20.643.000,00
5.2.02.05.001.00004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	87.255.000,00
5.2.02.05.001.00005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	182.956.000,00
5.2.02.05.002	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	3.916.978.440,00
5.2.02.05.002.00001	Belanja Modal Mebel	1.692.169.000,00
5.2.02.05.002.00003	Belanja Modal Alat Pembersih	13.695.000,00
5.2.02.05.002.00004	Belanja Modal Alat Pendingin	620.625.750,00
5.2.02.05.002.00006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.359.132.600,00
5.2.02.05.002.00007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	231.356.090,00
5.2.02.05.003	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	177.735.000,00
5.2.02.05.003.00001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	48.308.000,00
5.2.02.05.003.00003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	52.485.000,00
5.2.02.05.003.00004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	29.496.000,00
5.2.02.05.003.00007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	47.446.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	60.604.000,00
5.2.02.06.001	Belanja Modal Alat Studio	45.604.000,00
5.2.02.06.001.00001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	39.604.000,00
5.2.02.06.001.00002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	6.000.000,00
5.2.02.06.002	Belanja Modal Alat Komunikasi	15.000.000,00
5.2.02.06.002.00008	Belanja Modal Alat Komunikasi Khusus	15.000.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	369.929.800,00
5.2.02.07.001	Belanja Modal Alat Kedokteran	369.929.800,00
5.2.02.07.001.00001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	369.929.800,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	158.346.000,00
5.2.02.08.003	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	154.346.000,00
5.2.02.08.003.00013	Belanja Modal Alat Peraga Luar Biasa (Tuna Netra, Terapi Fisik, Tuna Daksa, dan Tuna Rungu)	49.896.000,00
5.2.02.08.003.00015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	4.000.000,00
5.2.02.08.003.00016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	100.450.000,00
5.2.02.08.007	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	4.000.000,00
5.2.02.08.007.00006	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup Lainnya	4.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	3.222.938.600,00
5.2.02.10.001	Belanja Modal Komputer Unit	2.803.263.000,00
5.2.02.10.001.00002	Belanja Modal Personal Computer	2.747.763.000,00
5.2.02.10.001.00003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	55.500.000,00
5.2.02.10.002	Belanja Modal Peralatan Komputer	419.675.600,00
5.2.02.10.002.00003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	369.779.600,00
5.2.02.10.002.00004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	49.896.000,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	53.550.000,00
5.2.02.15.003	Belanja Modal Alat SAR	53.550.000,00
5.2.02.15.003.00004	Belanja Modal Alat SAR Lainnya	53.550.000,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	17.248.000,00
5.2.02.18.001	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	17.248.000,00
5.2.02.18.001.00003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	17.248.000,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.400.000.000,00
5.2.02.99.099	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.400.000.000,00
5.2.02.99.099.09999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.400.000.000,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37.780.210.542,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	35.460.761.542,00
5.2.03.01.001	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	35.460.761.542,00
5.2.03.01.001.00001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	8.187.341.930,00
5.2.03.01.001.00006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	4.406.160.000,00
5.2.03.01.001.00010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	20.681.085.336,00
5.2.03.01.001.00018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	413.339.520,00
5.2.03.01.001.00030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	797.068.200,00
5.2.03.01.001.00032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	675.959.756,00
5.2.03.01.001.00036	Belanja Modal Taman	299.806.800,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.319.449.000,00
5.2.03.04.001	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	2.319.449.000,00
5.2.03.04.001.00004	Belanja Modal Pagar	2.319.449.000,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0,00
5.2.03.99.099	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0,00
5.2.03.99.099.09999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	69.116.471.683,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	45.814.613.905,00
5.2.04.01.001	Belanja Modal Jalan	43.639.998.014,00
5.2.04.01.001.00003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	11.656.251.155,00
5.2.04.01.001.00010	Belanja Modal Jalan Lainnya	31.983.746.859,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.04.01.002	Belanja Modal Jembatan	2.174.615.891,00
5.2.04.01.002.00013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	2.174.615.891,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	13.063.557.055,00
5.2.04.02.001	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	199.987.200,00
5.2.04.02.001.00008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	199.987.200,00
5.2.04.02.002	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	12.083.571.055,00
5.2.04.02.002.00004	Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut	12.058.224.055,00
5.2.04.02.002.00005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pasang Surut	14.484.000,00
5.2.04.02.002.00006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pasang Surut	10.863.000,00
5.2.04.02.004	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	55.784.400,00
5.2.04.02.004.00005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	55.784.400,00
5.2.04.02.007	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	724.214.400,00
5.2.04.02.007.00003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	724.214.400,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	6.298.794.723,00
5.2.04.03.009	Belanja Modal Instalasi Pengaman	6.298.794.723,00
5.2.04.03.009.00004	Belanja Modal Instalasi Pengaman Lainnya	6.298.794.723,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	3.939.506.000,00
5.2.04.04.001	Belanja Modal Jaringan Air Minum	486.580.000,00
5.2.04.04.001.00005	Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya	486.580.000,00
5.2.04.04.002	Belanja Modal Jaringan Listrik	3.452.926.000,00
5.2.04.04.002.00003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	3.452.926.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	265.765.000,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	49.868.000,00
5.2.05.01.001	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	49.868.000,00
5.2.05.01.001.00003	Belanja Modal Buku Agama	49.868.000,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	215.897.000,00
5.2.05.02.001	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	215.897.000,00
5.2.05.02.001.00004	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Lainnya	215.897.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	16.315.073,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	16.315.073,00
5.2.06.01.001	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	16.315.073,00
5.2.06.01.001.00002	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	16.315.073,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.3.01.01.001	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.3.01.01.001.00001	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.4	BELANJA TRANSFER	117.714.380.000,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	8.738.822.100,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	8.513.212.100,00
5.4.01.01.003	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	8.513.212.100,00
5.4.01.01.003.00001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	8.513.212.100,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	225.610.000,00
5.4.01.02.001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	225.610.000,00
5.4.01.02.001.00001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	225.610.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	108.975.557.900,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	108.975.557.900,00
5.4.02.05.001	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	64.287.925.900,00
5.4.02.05.001.00003	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	64.287.925.900,00
5.4.02.05.002	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	44.687.632.000,00
5.4.02.05.002.00004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	44.687.632.000,00
	Jumlah Belanja	1.048.202.600.000,00
	Total Surplus/(Defisit)	-5.000.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.000.000.000,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	5.000.000.000,00
6.1.01.05.001	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	5.000.000.000,00
6.1.01.05.001.00007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	5.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00
	Pembiayaan Netto	5.000.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Natuna,

Bupati

CEN SUI LAN